

**Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**

**Author**

Harmayanti<sup>1</sup>, Baharuddin Semailla<sup>2</sup>, Zainuddin Rahman<sup>3</sup>, Muhammad Ridwan Manulusi<sup>4\*</sup>

**Email**

[harmayanti@gmail.com](mailto:harmayanti@gmail.com)  
[baharuddin.semailla@umi.ac.id](mailto:baharuddin.semailla@umi.ac.id),  
[zainuddin.rahman@umi.ac.id](mailto:zainuddin.rahman@umi.ac.id)  
[mridwan600@gmail.com](mailto:mridwan600@gmail.com)

**Afiliasi**

<sup>1,4\*</sup> *Magister Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*

<sup>2,3</sup> *Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : Mengetahui Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Mengetahui Pengaruh PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Mengetahui Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Mengetahui Pengaruh PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui data BPS dengan 10 periode yakni dari tahun 2008-2018, survei dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2021. Data di analisis dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Modal.

**Kata kunci:** *Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat*

**Pendahuluan**

Pada dasarnya tujuan pokok dari pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana di maksud tidak hanya menyangkut kemampuan mencakup kebutuhan yang bersifat material (sandang, papan, dan pangan) namun juga kebutuhan yang bersifat nonmateril (pendidikan, kesehatan, sanitasi lingkungan dll) dengan pemenuhan kebutuhan ini di harapkan dapat meningkatkan sumberdaya manusia.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi (Edogbanya et al, 2013). Menurut Akudugu (2012), menyatakan bahwa pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui perkembangan

pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Menurut Kaur (2016), pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh teknologi dan pengetahuan yang bukan hanya di atas faktor fisik dan menurut Akonji et al. (2013), sebagian besar belanja publik dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu upaya pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan kesejahteraan. Kota Makassar memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan cenderung rendah dan masih terdapat disparitas antar daerah (Artana & Arka, 2015). IPM merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diukur dengan tiga standar indeks yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli (Peggy dan Swaningrum, 2015). Menurut Bassam (2013) hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan dimana beberapa kebutuhan dari masyarakat tergantung dari seberapa besar pendapatan yang dimiliki untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi, pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dengan diberikannya keleluasaan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) semestinya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan melalui peningkatan pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Tabel 1. IPM Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**

Tahun	PDRB (Juta Rp)
2008	71.37
2009	71.51
2010	77.63
2011	77.82
2012	78.47
2013	79.95
2014	79.35
2015	79.94
2016	80.53
2017	81.13
2018	81.73

Sumber: BPS Kota Makassar, 2021

Berdasarkan Tabel 1 menunjukan IPM di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. di tahun 2008 sebesar 71.37, di tahun 2009 sebesar 71.51 dan naik sebesar 1,9%, tahun 2010 sebesar 77.63 naik sebesar 0,8%, tahun 2011 sebesar 77.82 naik sebesar 2,4%, tahun 2012 sebesar 78.47 naik sebesar 8,3%, tahun 2013 sebesar 79.95 naik sebesar 0,18% dan di tahun 2014 mengalami penurunan yang tidak begitu besar yakni sebesar 79.35, dan mengalami penurunan sebesar 7,5% dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2015 sebesar 79.94 naik sebesar 7,4%, tahun 2016 sebesar 80.53 naik sebesar 7,3%,

di tahun 2017 sebesar 81.13 naik sebesar 7,4% dan di tahun 2018 sebesar 81.73 dan naik sebesar 2,2%.

Meningkatnya IPM tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi, melainkan dari berbagai aspek pembangunan (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014). Pembangunan manusia merupakan konsep yang mempertimbangkan aspek dalam menopang hidup yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Alexandra Hukom, 2014). Alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab ialah APBD dimana seluruh kegiatan atau kebijakan dari pemerintah bisa dilihat melalui APBD. Belanja daerah yang meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan merupakan semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat yang merupakan tujuan dan kewajiban pemerintah melalui peningkatan pelayanan dasar seperti peningkatan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja (Pasal 167 ayat 3 UU No 32/2004). Salih (2012), menambahkan bahwa pengeluaran publik harus digunakan tepat sasaran. Pemerintah melakukan belanja modal guna untuk mendapatkan aset tetap pemerintah seperti peralatan, bangunan, dan infrastruktur lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di daerah, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 pemerintah daerah memiliki sumber-sumber penerimaan terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Penerimaan yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri dari: 1) Dana Alokasi Umum (DAU), 2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 3) Dana Bagi Hasil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saragih (2003), DAU berperan sebagai pemerataan fiskal antardaerah (*fiscal equalization*) di Indonesia. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*), sehingga pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (*public service function*), melaksanakan fungsi pembangunan (*development function*) dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat (*protective function*). DAK berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat dan mendesak. Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Selain memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, daerah otonom juga memiliki kewenangan menentukan kebijakan pemerintah dan pembangunan secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dan sumber-sumbernya. Pendapatan daerah yang diperoleh dari daerah sendiri disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarnya potensi PAD yang dimiliki suatu daerah dapat dilihat dari Derajat Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu rasio antara PAD dengan Total Pengeluaran Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan PAD lebih fleksibel dibandingkan dengan dana perimbangan, namun harus tetap dikelola sebagai pendapatan pemerintah dengan prinsip transparan dan bertanggung jawab. Antara PAD dengan DAU memiliki hubungan yang negatif. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, agar pelayanan untuk kebutuhan dasar dapat terpenuhi.

Pendapatan daerah merupakan topangan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan apabila pengalokasiannya tepat sasaran akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat yang dapat diukur dengan IPM. Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan bahwa pemerintah harus mampu mengontrol proporsi belanja untuk dialokasikan lebih dalam belanja pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. PAD dapat menggambarkan seberapa besar kemandirian suatu daerah, dengan PAD yang tinggi diharapkan tingkat investasi pada belanja modal juga ikut meningkat sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Nurudeen (2010) menyatakan bahwa, pemerintah memiliki peran yang besar dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat besar melalui pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (Dalamagas et al, 2010). Meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan, masyarakat cenderung melakukan migrasi dari desa ke kota

Dana Perimbangan adalah konskuensi dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok - pokok pemerintahan di daerah, namun dalam prakteknya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal selama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangi ketimpangan vertikal dan horisontal, yang ditunjukkan dengan tingginya derajat sentralisasi fiskal dan besarnya ketimpangan antar daerah dan wilayah. Dana Perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 19). Dana Perimbangan terdiri atas, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana perimbangan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan di daerah dengan mengatasi ketimpangan fiskal yang terjadi. Dana perimbangan dibedakan menjadi tiga yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), dimana DAU bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka desentralisasi dan menutup celah fiskal yang bertujuan meningkatkan potensi daerah, DAK bertujuan membiayai kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional, DBH adalah dana dari APBN kepada daerah berdasarkan potensi yang dimiliki daerah untuk dikembangkan.

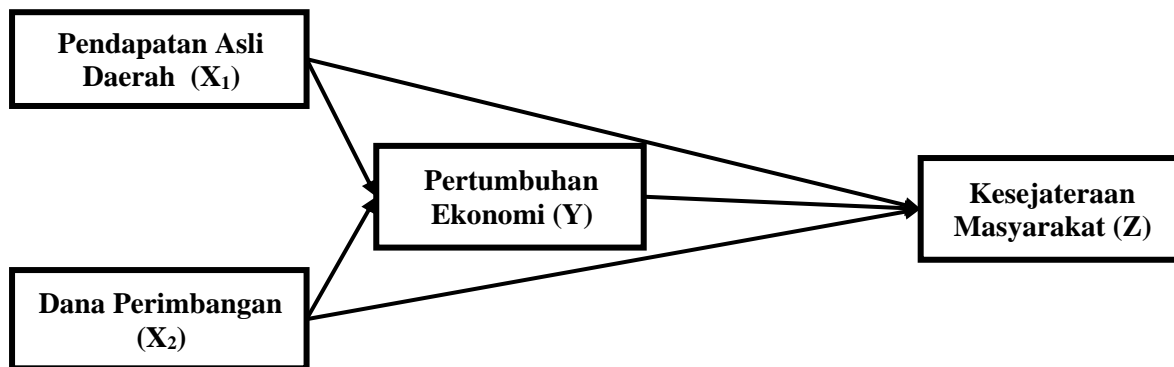
Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Apabila suatu daerah memiliki sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat, merupakan salah satu instrument penting untuk mengontrol perekonomian.

Chinweoke et al. (2014) menyatakan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatnya belanja modal akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, begitu juga menurut Nworji et al. (2012) menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal. Fisoranti et al. (2012) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus mampu mengontrol belanja operasionalnya. Pendapatan daerah merupakan topangan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan apabila pengalokasiannya tepat sasaran akan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan IPM.

(Suartha dan Murjana, 2017). Desentralisasi diharapkan dapat mendorong pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi jumlah kemiskinan (Miranti et al., 2014). Dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan mengatasi ketimpangan fiskal, sehingga daerah mampu mengalokasinya untuk membangun fasilitas

publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ogujiuba et al. 2012). Wewenang daerah dalam mengatur sumber daya dan keuangan daerah merupakan cermin dari otonomi daerah , selain itu kebijakan otonomi dapat tercermin melalui keterbukaan ekonomi daerah tersebut (Fajrii, dkk. 2016). Dana

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah “Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ”



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah: 1) PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 2) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 3) PAD berpengaruh terhadap positif kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 4) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 5) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 6) PAD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal. 7) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Lokasi penelitian ini di lakukan di Kota Makassar, BPS Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu selama bulan april dan mei 2021

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2011;15)

Sumber data dalam penelitian adalah

subyek dari mana data dapat diperoleh ( Arikunto, 2006;129) Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu sumber data yaitu : Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumentasi.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data penelitian, yang dilakukan dengan mengambil data PAD, Dana perimbangan, Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Suyana Utama, 2012 menyebutkan bahwa dalam analisis jalur terdapat suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan namun menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Demikian juga Kerllinger (2002) menyebutkan bahwa dengan menggunakan analisis jalur akan dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel.

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \quad (1)$$

$$Z = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y + e_2 \quad (2)$$

## Hasil dan Pembahasan

Untuk analisis jalur akan di selesaikan dengan membagi pengujian dengan membuat dua koefisien jalur yaitu jalur model I dan jalur model II. Besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y1) Secara parsial dapat di lihat sebagai berikut:

**Tabel 2. Regresi Model jalur 1**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-227268537726.548	169207684828.221		-1.343	.216
1 Pendapatan Asli Daerah	.006	.002	.713	2.375	.045
Dana Perimbangan	.193	.235	.246	.820	.436

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output SPSS (2021)

Pada Tabel 2 signifikansi Pendapatan Asli Daerah (X1) lebih kecil dari 0.05 ( $0.045 < 0.05$ ) maka signifikansinya diterima Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh signifikansi terhadap Belanja Modal (Y) dan signifikansi Dana Perimbangan (X2) lebih besar dari 0.05 ( $0.436 > 0.05$ ) maka signifikansinya ditolak Dana Perimbangan (X2) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y)

**Tabel 3. Model Summary**

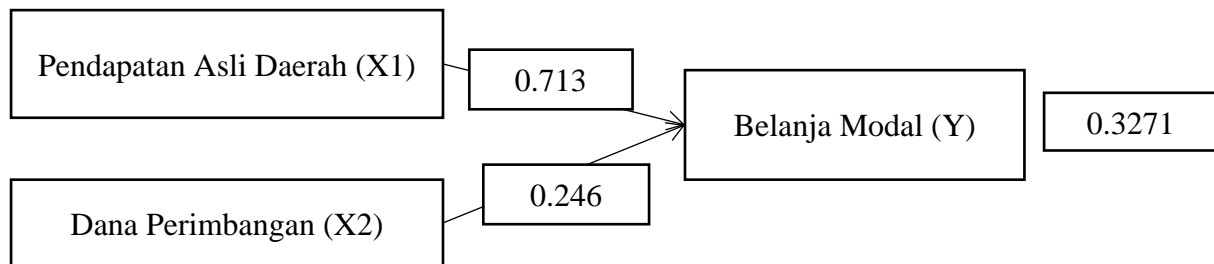
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.945a	.893	.867	120149247547.49661

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS (2021)

Besarnya nilai R Square yang terdapat pada table model Summary adalah sebesar 0.893 hal ini membuktikan bahwa sumbangan X1 (Pendapatan Asli Daerah) dan X2 (Dana

Perimbangan) terhadap Y (Belanja Modal) adalah sebesar 89.3% sementara sisanya 10.7% merupakan kontribusi variable yang tidak di teliti.



**Gambar 2. Diagram Jalur I**

Sumber: *Output SPSS (2021)*

e1 dapat di cari dengan rumus  $e1 = \sqrt{1 - 0.893} = \sqrt{0.107} = 0.3271$  dengan demikian di peroleh model jalur I sebagai berikut =0.3271.

Selanjutnya Jalur Model II (Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Modal (Y) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat(Z). Besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Modal (Y) terhadap Kesejahteraan Masyarakat(Z) secara parsial dapat di lihat sebagai berikut:

**Tabel 4. Regresi Model jalur 2**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	Sig.
1	(Constant)	74.196	3.684		20.141
	Pendapatan Asli Daerah	3.983E-014	.000	.457	.638
	Dana Perimbangan	-2.619E-013	.000	-.031	-.054
	Belanja Modal	4.471E-012	.000	.415	.643

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: *Output SPSS (2021)*

Jika Pendapatan Asli Daerah (X1) lebih besar dari 0.05 ( $0.544 > 0.05$ ) maka hipotesisnya ditolak Pendapatan Asli Daerah (X1) tidak berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Z), jika Dana Perimbangan (X2) signifikansi lebih besar dari 0.05 ( $0.958 > 0.05$ ) maka hipotesis ditolak artinya Dana Perimbangan (X2) tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Z) dan jika Belanja Modal (Y) signifikansi lebih besar dari 0.05 ( $0.541 > 0.05$ ) Maka hipotesisnya di tolak artinya Belanja Modal (Y) tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Z)

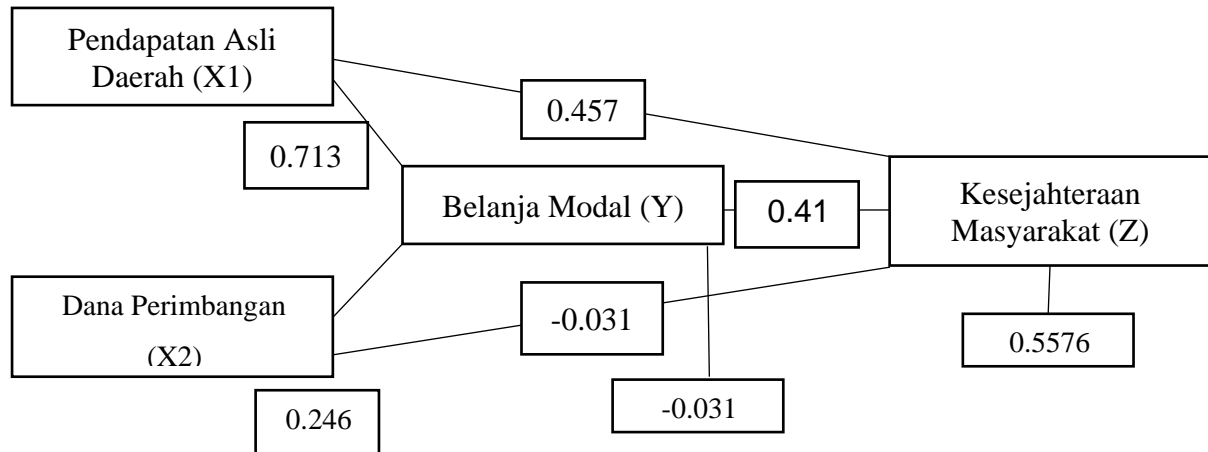
**Tabel 5. Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.830a	.689	.556	2.36292

a. Predictors: (Constant ), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Sumber: *Output SPSS (2021)*

Besarnya nilai R Square yang terdapat pada Model Summary adalah sebesar 0.689 hal ini membuktikan bahwa sumbangan X1 (Pendapatan Asli Daerah) X2( Dana Perimbangan) dan Y (Belanja Modal) adalah sebesar 68.9 % sementara sisanya 31.1% berasal dari variable yang tidak di teliti.



**Gambar 3. Diagram Jalur II**

Sumber: *Output SPSS (2021)*

Di peroleh nilai R Square =  $e^2$ , dapat di cari dengan  $e^2 = \sqrt{1-0.689} = \sqrt{0.311} = 0.5576$  dengan demikian di peroleh model analisis jalur 2 sebagai berikut = 0.5576

### ***Pembahasan***

#### ***Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal (Y) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan***

Dalam penelitian ini diperoleh hubungan positif antara PAD terhadap belanja modal, hasil yang sama diperoleh oleh Panji (2014) dimana dalam penelitiannya pengaruh positif dan signifikan variabel PAD terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan hasil variabel Investasi berpengaruh positif dan tidak Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kota Makassar provinsi Sulawesi selatan. Terlihat dari Hasil regresi model I yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (X1) lebih kecil dari 0,05 ( $0,045 < 0,05$ ) maka dengan demikian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Rofiq (2013) dimana di temukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Kemudian sependapat dengan penelitian yang di lakukan oleh Situngkir dan Manurung, meneliti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten atau Kota Sumatera Utara.

#### ***Pengaruh Dana Perimbangan (X2) terhadap Belanja Modal (Y) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dapat di lihat dari hasil Analisis regresi jalur I yang menunjukkan bahwa dana perimbangan lebih besar dari 0,05 ( $0,436 > 0,05$ ), maka dengan demikian Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dari teori yang di kemukakan oleh Capkova dan Rancakova, mekanisme utama untuk transfer antar pemerintah adalah transfer dari pemerintah



pusat ke pemerintah daerah. Berbagai macam tanpa syarat (Umum) di gunakan untuk mengatasi ketidak seimbangan vertical. Transfer dengan syarat (khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai layanan tertentu

Namun penelitian yang di lakukan tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah di lakukan oleh Yulianus Lisa, Priyagus (2017) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

***Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Z) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dapat dilihat dari hasil Regresi Jalur Model II yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah lebih besar dar 0.05 ( $0,544 > 0,05$ ) maka dengan demikian Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Sejalan dengan Penelitian yang di lakukan oleh Fitria Megawati Sularno (2013) menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Namun tidak sejalan dengan Penelitian Ardiansyah Putra (2015) mengatakan bahwa PAD berpengaruh simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara, dan penelitian yang di lakukan oleh Setiyawati Anis dan Hamzah Adr (2016). Meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat hasilnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

***Pengaruh Belanja Modal (Y) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Z) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat dapat di lihat dari Hasil Regresi Jalur II yang menunjukkan bahwa Belanja Modal lebih besar dari 0,05 ( $0,541 > 0,050$ ) maka dengan demikian Belanja Modal Tidak memiliki pengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Setiyawati Anis dan Hamzah Adr (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Adhansyah Putra (2015). Meneliti pengaruh Belanja Modal terhadap kesejahteraan masyarakat bermoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil penelitian ini hasilnya bahwa secara simultan dan parsial Belanja Modal berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

***Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Z) melalui Belanja Modal (Y) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan***

Berdasarkan hasil perhitungan yang di lakukan yakni pengaruh langsung X1 terhadap Z sebesar 0,457 sedangkan pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z adalah perkalian nilai beta  $X1 = 0,713$  terhadap Y dengan nilai beta  $Y = 0,415$  terhadap Z yaitu  $0,713 \times 0,415 = 0,295$  maka dari itu pengaruh total yang di berikan oleh X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung di tambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu  $0,457 + 0,295 = 0,752$  berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat di ketahui nilai pengaruh langsung adalah 0,457 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,415 dari data tersebut terlihat pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh langsung. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z.

Tidak sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan Suwandi dan Tahar (2015), dan Siswadi, dkk (2015) dimana PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan melalui

belanja modal. Pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan belanja modal dimana pembangunan pelayanan publik terus dilakukan seperti prasarana kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan, sehingga untuk meningkatkan belanja modal pemerintah harus mampu menggali PAD yang besar. PAD yang besar mampu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan belanja pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat, atau dengan kata lain semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan.

***Pengaruh Dana Perimbangan (X2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Z) melalui Belanja Modal (Y) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan***

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan yakni pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y adalah perkalian nilai beta X2 terhadap Y sebesar -0,031 sedangkan pengaruh tidak langsung X2 terhadap Z melalui Y adalah perkalian nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu  $0,246 \times 0,415 = 0,102$  maka dari itu pengaruh total yang diberikan oleh X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu  $-0,031 + 0,102 = 0,071$ . Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui nilai pengaruh langsung adalah -0,031 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,071 dari data tersebut terlihat pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y berpengaruh signifikan terhadap Z.

Hasil penelitian dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal sesuai dengan penelitian Adiputra, dkk (2014), dan Siswadi, dkk (2015) bahwa belanja modal memediasi dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam prosesnya pembangunan infrastruktur memerlukan dana yang sangat besar adanya ketimpangan pendapatan antar daerah mengharuskan pemerintah pusat melakukan desentralisasi fiskal

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka simpulan dalam penelitian ini adalah 1) PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 2) Dana Perimbangan berpengaruh Signifikan Terhadap Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 3) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 4.) Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 5) Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 6) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 7) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Belanja Modal.

## **Referensi**

Adiputra, Dwiyantri dan Darmadi. 2014. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Jurnal Akuntansi. 7(3).

- Akonji, D. A., Olubukola, O. A., and Wakilia, A. M. 2013. Nexus Between Publik Expenditure and Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*. 2(4). Hal: 2383-2395.
- Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. Accountabillity in local Government revenue management: who does what?. *Journal of Sustainable Development*. 2(2).
- Alexandra Hukum.2014. Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 7(2).
- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Lombok: SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram.
- Artana Yasa dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1).
- Bassam A. Al Bassam. 2013. The Relationship Between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Devlopment*. 2(4). Hal: 1-18.
- Chinweoke, N., Ray, N., and Paschal, N. O. 2014. Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economic Growth (1992-2011). *The Macrotheme Review*. 3(7). Hal: 79-87.
- Dalamagas, Basil. 2010. Publik Sektor and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 32. Hal:277-288.
- Edogbanya, Adejoh. 2013. Revenue Generation: Impact on Government Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *Global Journal of Management and Business Research*.
- Fajrii, Arman dan Yohanes. 2016. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2).
- Fasoranti, Mary Modupe. 2012. The Effect of Government Expenditure on Infrastructure on the Growth of the Nigeria Economy, 1997-2009. *International Journal of Economic and Finansial Issues*. 2(4). Hal: 513-518.
- Fitria Megawati Sularno (2013). Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Pada Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Selama Per 20092011)
- Miranti, Riyana., Alan Duncan, and Rebecca Cassells. 2014. Revisiting the Impact of Consumption Growth and Inequality on Poverty in Indonesia during Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studie*. 50(3). Hal: 461482.
- Nurudeen, A., and Usman, A. 2010. Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970-2008: A Disaggregate Analysis. *Business and Economic Journal*. 4. Hal: 1-11.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Tomothy C, O., and Nworji. L. O. 2012. Effects of Publik Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Science and Business Research*. 1(7). Hal: 1-15.
- Peggy dan Swaningrum. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1).
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. The Relationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidance from Sunda. *International Business Research*. 5(8). Hal: 40-46.
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Setiyawati Anis dan Hamzah Adr (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DAU, dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten dan Kota seJawa Tengah). Jurnal Prestasi. 9(1).
- Siswadi, Putriningsih dan Irwan.2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal. Jurnal ASSETS. 5(2).
- Suartha dan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. 10(1).
- Suwandi dan Tahar.2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). Jurnal InFestasi. 11(1). Hal: 118-136.
- Yulianus Lisa, Priyagus (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.